

Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana Di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Richard Simon Popang

NPP. 32.0869

Asdaf Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: richardpopang@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Selamat Jalaludin, S.Pi, SH, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research focuses on the low effectiveness of the implementation of the Disaster Resilient Village (Destana) Program in Palolo Sub-district, Sigi Regency, which can be seen from the lack of optimal community preparedness, lack of community participation, lack of supporting facilities, and the lack of integration of the program into village development planning. Although the program has been running, various technical, coordination, and funding obstacles make the program's achievements not optimal and risk not being sustainable if not thoroughly evaluated. **Purpose:** The purpose of this study was to thoroughly evaluate the Disaster Resilient Village Program in Palolo Sub-district, Sigi Regency, Central Sulawesi Province. **Methods:** This research used Qualitative method with descriptive approach. Data collection techniques were conducted by in-depth interviews (4 key informants, 2 additional informants), field observations and documentation. **Results:** The findings of this study indicate that the Disaster Resilient Village (Destana) Program in Palolo Sub-district has contributed to increasing community awareness and knowledge in dealing with disasters. However, the level of community participation still varies, preparedness has not been evenly distributed, and program implementation has not fully run according to plan. The main obstacles found include budget constraints, lack of cross-sector coordination, low village capacity, and lack of supporting facilities. In addition, the program has not been fully integrated into village development planning, making its implementation less sustainable. These findings inform the need for improved implementation strategies, more intensive community involvement, and strengthened regional policies. **Conclusion:** The conclusion of this study shows that the Disaster Resilient Village Program in Palolo Sub-district has had a positive impact in improving community understanding of disaster preparedness, but its implementation still faces various obstacles, such as limited resources, low community participation, and not optimal cross-sector coordination. Therefore, the program needs to be strengthened through integration into village development planning, increased budget support, as well as ongoing training and mentoring in order to run more effectively and sustainably.

Keywords: Evaluation; Disaster Resilient Village Program; Disaster Preparedness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada masih rendahnya efektivitas implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang terlihat dari belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat, kurangnya partisipasi warga, minimnya sarana pendukung, serta belum terintegrasinya program ke dalam perencanaan pembangunan desa. Meskipun program sudah berjalan, berbagai hambatan teknis, koordinasi, dan pendanaan membuat capaian program belum maksimal dan berisiko tidak berkelanjutan jika tidak dievaluasi secara menyeluruh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh Program Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (4 informan kunci, 2 informan tambahan), Observasi lapangan dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kecamatan Palolo telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi, kesiapsiagaan belum merata, dan pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, rendahnya kapasitas desa, dan minimnya fasilitas pendukung. Selain itu, program belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaannya kurang berkelanjutan. Temuan ini menjadi dasar perlunya perbaikan strategi pelaksanaan, pelibatan masyarakat yang lebih intensif, serta penguatan kebijakan daerah. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Program Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Palolo telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, program ini perlu diperkuat melalui integrasi ke dalam perencanaan pembangunan desa, peningkatan dukungan anggaran, serta pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi; Program Desa Tangguh Bencana; Kesiapsiagaan Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi. Berdasarkan buku Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kebencanaan yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020 Indonesia berada dalam peringkat 35 (tiga puluh lima) negara yang menunjukkan kerentanan signifikan terhadap bencana, dan kemudian di tahun 2023 World Risk Report (WRR) melaporkan skor World Risk Index (WRI) Indonesia mencapai angka 43,5 dari 100 yang mengakibatkan Indonesia berada di posisi kedua Negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Kesadaran akan tingginya risiko bencana di Indonesia telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai

lembaga yang bertanggung jawab dalam koordinasi penanggulangan bencana, telah meluncurkan berbagai program untuk memperkuat ketahanan masyarakat, salah satunya melalui Program Desa Tangguh Bencana. Program ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2012 dengan landasan hukum Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012. Tujuan pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana berdasarkan regulasi tersebut adalah Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana; Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana. Meningkatkan kapasitas, kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana; Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB (Pengurangan Risiko Bencana), pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli. kemampuan baca tulis saja, tetapi termasuk dalam mengolah informasi textual, bercerita, serta memanfaatkan informasi untuk mengembangkan diri hingga mampu menularkan budaya literasi itu sendiri kepada orang lain. Alasan dipilihnya lorong dalam program ini yakni agar membangun budaya literasi pada tingkat terendah mulai dari RT, RW, LPM, dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat termasuk generasi muda sebagai agen perubahan.

Desa Tangguh Bencana adalah inisiatif yang diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam. Program Desa Tangguh Bencana merupakan implementasi nyata dari pendekatan ini, di mana masyarakat diberdayakan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi bencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya di desa-desa yang rawan bencana, agar mampu mandiri dalam mengidentifikasi ancaman bencana, mempersiapkan diri, serta mengambil tindakan yang tepat dalam situasi darurat. Melalui pelatihan, simulasi, dan sosialisasi, dalam program Desa Tangguh Bencana masyarakat diberdayakan agar dapat secara mandiri mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, terlibat aktif dalam sosialisasi dan edukasi yang diberikan, pelatihan evakuasi, mendukung pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, Pembentukan tim tanggap darurat, pembentukan posko bencana, latihan penanganan korban, yang kegiatan tersebut dilakukan oleh tim BPBD. Kabupaten Sigi, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, penerapan program Desa Tangguh Bencana di daerah ini menjadi sangat penting. Salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi yang rentan terdampak bencana adalah Kecamatan Palolo, Kecamatan ini dikelilingi oleh pegunungan dengan kemiringan yang curam dan aliran sungai yang deras, terutama pada saat musim hujan.

Walaupun program Desa Tangguh Bencana telah diterapkan di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Palolo, ternyata terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan masyarakat masih belum memiliki kapasitas yang optimal dalam menghadapi bencana. Permasalahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada bantuan eksternal, kurangnya koordinasi, sosialisasi yang belum merata, serta kendala ekonomi menjadi hambatan dalam mencapai tujuan program ini. Program ini merupakan satu-satunya program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di daerah

ini, sehingga program ini tentu sangat diharapkan keberhasilannya dalam menurunkan dampak risiko bencana yang berpotensi dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat ketika bencana terjadi. Namun sangat disayangkan program ini seakan-akan pelaksanaannya tidak maksimal dalam memberikan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Hal ini menjadi alasan penting untuk melakukan evaluasi terhadap Program Desa Tangguh Bencana, khususnya dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana di Kecamatan Palolo.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan penelitian (research gap) yang mendasari studi ini berangkat dari pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah rawan bencana seperti Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Sejak diluncurkannya program ini oleh pemerintah pusat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengevaluasi keberhasilan maupun kelemahannya di tingkat desa dengan pendekatan evaluatif yang sistematis. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti aspek implementasi secara umum atau terbatas pada satu-dua indikator seperti partisipasi masyarakat atau pemahaman risiko bencana, dan banyak dilakukan di wilayah perkotaan atau daerah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dari Kecamatan Palolo.

Padahal, Kecamatan Palolo merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, khususnya banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, serta memiliki keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan aksesibilitas yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program kebencanaan. Belum adanya kajian yang secara spesifik menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam mengkaji efektivitas Program Destana di wilayah ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dalam literatur kebencanaan lokal. Selain itu, belum ada pemetaan menyeluruh terkait sejauh mana keterlibatan masyarakat, keberlanjutan kegiatan, serta hambatan dan peluang program di desa-desa sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam, faktual, dan terukur tentang pelaksanaan Program Destana di Kecamatan Palolo sebagai basis rekomendasi kebijakan dan penguatan program kedepan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Istiqowati, C. tahun 2018 dengan judul Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Mitigasi Bencana, yang menemukan bahwa keberhasilan Program Destana sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya lokal, khususnya dalam aspek pelatihan masyarakat, ketersediaan sarana evakuasi, dan pembentukan relawan. Pelibatan masyarakat menjadi kunci utama efektivitas mitigasi.

Selanjutnya penelitian oleh Lumempouw, S. V. M., Ruru, J. M., & Londa, Y pada tahun 2021 dengan judul Pengembangan Kapasitas Masyarakat di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, yang menemukan bahwa program pemberdayaan dan pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana berjalan baik karena dukungan dari berbagai pihak, termasuk koordinasi lintas sektor dan kepemimpinan desa yang aktif (Lumempouw, 2021).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Oktari, R. S pada tahun 2019 yang berjudul Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana, Pelatihan dan simulasi bencana berhasil

meningkatkan pemahaman masyarakat di daerah rawan bencana. Program berjalan efektif berkat pendampingan rutin dari lembaga perguruan tinggi dan BPBD (Oktari, 2019).

Lalu penelitian oleh Fitriadi, R. W., Kumalawati, R., & Arisanty, D pada tahun 2017 berjudul Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tabalong yang menemukan bahwa kesiapsiagaan masyarakat tergolong rendah akibat minimnya sosialisasi dan pelatihan serta belum terbentuknya sistem siaga berbasis komunitas (Fitriadi et al., 2017)

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Watora, N., & Ilham, A. A. Pada tahun 2024 yang berjudul Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Badung, yang menemukan integrasi Destana dalam perencanaan pembangunan daerah serta keterlibatan aktif dari LSM menjadikan program ini berkelanjutan. Program ini dipandang berhasil karena mendapatkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah (Watora & Ilham, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menunjukkan keberhasilan program ketika ada dukungan lintas sektor, pelatihan berkelanjutan, dan integrasi kebijakan. Sementara penelitian ini memperlihatkan kesenjangan koordinasi, keterbatasan anggaran, belum berkelanjutannya kegiatan, dan lemahnya dukungan kebijakan daerah, yang menjadi pembeda dan sekaligus kontribusi ilmiah terhadap literatur tentang evaluasi program berbasis kebencanaan di tingkat lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan pendekatan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang secara spesifik mengungkap kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program di daerah rawan bencana berbasis desa. Tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroiti efektivitas program dari sisi pelatihan atau keterlibatan masyarakat secara umum, penelitian ini mengidentifikasi secara rinci hambatan koordinasi lintas level pemerintahan, lemahnya integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan desa, serta terbatasnya pendanaan dan keberlanjutan program.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi unik melalui eksplorasi keterbatasan partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan, dan minimnya dukungan LSM/CSR di wilayah studi, yang belum banyak disorot dalam penelitian serupa sebelumnya. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memperkuat literatur terkait kebijakan mitigasi bencana berbasis komunitas, tetapi juga memberikan rekomendasi implementatif yang lebih kontekstual dan strategis untuk daerah dengan karakteristik geografis dan sosial seperti Palolo, Sigi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi program secara menyeluruh, tidak hanya dari hasil akhir (output), tetapi juga proses pelaksanaan, dukungan sumber daya, dan relevansi kontekstual. Model CIPP dianggap efektif dalam mengevaluasi program berbasis masyarakat karena mampu mengidentifikasi faktor-faktor kritis pada setiap tahap implementasi program (Stufflebeam & Zhang, 2017).

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan penerima manfaat program. Mereka dipilih secara purposive untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan dan mendalam. Informan kunci

terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sigi, sebagai penanggung jawab program secara teknis di tingkat kabupaten.
2. Camat Palolo, sebagai penghubung antara kabupaten dan desa.
3. Kepala Desa Ranteleda, sebagai pelaksana di tingkat desa yang menjadi lokasi utama studi.
4. Masyarakat desa yang menjadi penerima manfaat program secara langsung.

Penggunaan informan dari berbagai tingkat ini juga disesuaikan dengan pendekatan multi-level stakeholder dalam evaluasi kebijakan publik, seperti dijelaskan dalam penelitian Kim & Park (2019), bahwa pengambilan data dari berbagai lapisan memperkuat validitas hasil penelitian kualitatif berbasis program.

Penelitian dilaksanakan selama tanggal 6 sampai 29 Januari 2025 di wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Waktu pengumpulan data lapangan berlangsung sekitar empat minggu, meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Pendekatan triangulasi digunakan untuk meningkatkan keabsahan data, sebagaimana disarankan oleh Nowell et al. (2017) dalam studi mereka tentang validitas dalam penelitian kualitatif berbasis analisis tematik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengevaluasi program Desa Tangguh Bencana menggunakan evaluasi CIPP Model menurut Daniel Stufflebeam pada tahun 1971. Teori ini memiliki 4 dimensi yaitu *Context*, *Input Process* dan *Product*, yang mana 4 dimensi ini akan mengevaluasi program secara menyeluruh mulai dari latar belakang kebutuhan program hingga peluang keberlanjutannya di masa depan.

3.1 Context Program

Aspek konteks (*context*) berfokus pada analisis kebutuhan, permasalahan, dan kondisi lingkungan yang melatarbelakangi pelaksanaan program. Berikut adalah temuan-temuan utama dalam indikator konteks berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

1. Tingginya Risiko Bencana

Wilayah Kecamatan Palolo memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang berbukit dan curah hujan yang tinggi. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan frekuensi bencana, dengan dampak signifikan terhadap infrastruktur dan mata pencaharian masyarakat.

Fenomena serupa juga ditemukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana strategi pemberdayaan masyarakat oleh BPBD dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana menjadi fokus utama untuk mengurangi risiko bencana (Ginting, 2020).

2. Keterbatasan Kapasitas Lokal

Sebelum pelaksanaan program Destana, sebagian besar desa di Kecamatan Palolo belum memiliki sistem peringatan dini, jalur evakuasi yang jelas, atau struktur relawan kebencanaan yang terorganisir. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah, dengan minimnya pelatihan dan simulasi kebencanaan yang dilakukan. Kondisi serupa juga terjadi di Nagari Ganggo Hilia, Kabupaten Pasaman, di mana keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi tantangan dalam penanggulangan bencana

(Wardhono, A., et al., 2023).

3. Keterlibatan Pemerintah dan Masyarakat

Pembentukan program Destana di wilayah ini merupakan inisiatif dari BPBD Kabupaten Sigi, bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan, pembentukan relawan, dan penyusunan rencana kontinjensi desa. Studi di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat oleh BPBD efektif dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program (Ginting, 2020).

4. Tujuan Program yang Jelas

Program Destana bertujuan untuk menciptakan kemandirian desa dalam menghadapi bencana, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa. Implementasi kebijakan penanganan gempa bumi di Lombok tahun 2018 menunjukkan bahwa pembentukan Desa Tangguh Bencana sebagai program unggulan pemerintah provinsi dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana (Rahman, Jeddawi, Mansur, dan Kurniawati, 2023).

3.2 *Input Program*

Evaluasi terhadap input dalam program Destana mencakup tiga komponen utama: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sarana prasarana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masing-masing komponen tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam mendukung pelaksanaan program secara optimal.

Pertama, dari sisi sumber daya manusia, keterlibatan perangkat desa, relawan, dan masyarakat umum dalam mendukung program masih terbatas. Pelatihan yang pernah diberikan belum dilakukan secara berkelanjutan, dan belum menyentuh seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok rentan. Banyak warga belum memiliki kompetensi dasar terkait mitigasi dan tanggap darurat bencana. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman et al. (2023) bahwa program kebencanaan sering menghadapi kendala rendahnya kapasitas lokal akibat terbatasnya pelatihan yang sistematis dan menyeluruh di tingkat desa.

Kedua, dari aspek sumber daya anggaran, pendanaan program masih sangat bergantung pada APBD tahunan. Belum ada skema pendanaan jangka panjang atau kolaborasi lintas sektor yang dapat memastikan keberlanjutan program. Ini menyebabkan banyak kegiatan seperti simulasi, pelatihan lanjutan, dan pembelian alat tanggap darurat tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Studi oleh Lassa et al. (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan program pengurangan risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komitmen pendanaan yang konsisten dan berbasis jangka panjang.

Ketiga, dari sisi sarana dan prasarana, sebagian besar desa di Kecamatan Palolo belum memiliki fasilitas siaga bencana seperti posko, jalur evakuasi yang jelas, atau sistem peringatan dini. Bahkan, beberapa desa yang memiliki potensi risiko tinggi belum dilengkapi dengan peta rawan bencana atau alat komunikasi darurat. Penelitian oleh Shaw et al. (2020) juga menggarisbawahi bahwa kesiapan infrastruktur lokal sangat penting untuk mendukung efektivitas program berbasis masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Secara keseluruhan, indikator input menunjukkan bahwa meskipun program Destana telah diluncurkan, kualitas dukungan awalnya masih belum merata dan belum cukup kuat untuk mendukung program berjalan secara optimal di semua desa. Kelemahan dalam input

ini berisiko menurunkan efektivitas implementasi dan keberlanjutan program di masa depan.

3.3 Process Program

Evaluasi terhadap indikator *process* dalam Program Destana menitikberatkan pada bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi dijalankan selama program berlangsung.

Pertama, dari aspek perencanaan, ditemukan bahwa sebagian besar rencana kegiatan program masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan serta karakteristik lokal masing-masing desa. Beberapa kegiatan tidak dirancang berdasarkan analisis risiko spesifik, sehingga kurang kontekstual dan cenderung seragam antar desa. Hal ini diperkuat oleh temuan Triana et al. (2021), yang menunjukkan bahwa keberhasilan program kebencanaan di tingkat lokal memerlukan perencanaan partisipatif yang mengacu pada data risiko dan kapasitas desa secara spesifik.

Kedua, dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pelatihan dan simulasi bencana, meskipun sempat dilakukan pada awal program, namun pelaksanaannya belum rutin dan tidak merata di seluruh desa. Waktu pelaksanaan kegiatan juga kurang menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga banyak warga yang tidak dapat terlibat secara optimal. Kondisi ini menunjukkan lemahnya manajemen program di tingkat lapangan.

Ketiga, dari sisi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Destana cenderung masih rendah. Banyak warga belum merasa memiliki program ini karena belum dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Aldunce et al. (2016), partisipasi komunitas adalah kunci keberhasilan dalam membangun ketangguhan terhadap bencana, khususnya di kawasan rentan.

Keempat, koordinasi antar aktor, terutama antara BPBD, kecamatan, dan pemerintah desa, masih belum berjalan optimal. Informasi program terkadang tidak sampai ke desa dengan baik, dan ada tumpang tindih peran antar aktor. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program dan penurunan efektivitas intervensi yang dilakukan.

Kelima, pada aspek monitoring dan evaluasi, mekanisme pemantauan kegiatan Destana masih lemah. Tidak semua kegiatan dievaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi belum dijadikan dasar untuk perbaikan program. Dalam beberapa kasus, pelaporan dari desa ke kecamatan atau BPBD pun bersifat administratif saja dan kurang mencerminkan realitas lapangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program belum sepenuhnya matang dan partisipatif. Kurangnya sistem manajemen program yang berkelanjutan menyebabkan kesenjangan antara perencanaan, implementasi, dan dampak nyata di masyarakat.

3.4 Product Program

Indikator *product* dalam model evaluasi CIPP merujuk pada hasil atau keluaran yang dicapai dari pelaksanaan program, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks Program Destana di Kecamatan Palolo, temuan menunjukkan bahwa capaian program belum sepenuhnya optimal, meskipun terdapat beberapa hasil positif.

Pertama, dari segi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, ditemukan bahwa sebagian warga mulai memahami pentingnya mitigasi bencana, seperti evakuasi mandiri, penggunaan jalur evakuasi, serta pentingnya komunikasi darurat. Namun,

pemahaman ini masih terbatas pada warga yang mengikuti pelatihan, sementara sebagian besar masyarakat belum terpapar secara langsung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yulianto dan Damayanti (2022) yang menyebutkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tidak akan efektif tanpa edukasi yang kontinu dan menyeluruh.

Kedua, secara fisik, program Destana telah menghasilkan beberapa sarana pendukung seperti pembentukan tim relawan desa, penyusunan dokumen rencana kontinjensi, dan pengadaan peralatan dasar (misalnya rompi, peluit, megafon). Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas ini belum tersedia merata di semua desa, dan beberapa di antaranya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan output program antar wilayah.

Ketiga, pada aspek kelembagaan, keberadaan struktur organisasi siaga bencana di tingkat desa menjadi salah satu produk utama. Namun, fungsinya belum berjalan secara aktif karena kurangnya pembinaan dan insentif. Seperti yang dijelaskan oleh Wulandari & Prasetyo (2021), struktur kelembagaan lokal akan efektif jika didukung dengan pelatihan berkelanjutan dan integrasi ke dalam kebijakan desa.

Keempat, produk jangka panjang berupa ketangguhan masyarakat belum sepenuhnya terbentuk. Beberapa desa menunjukkan inisiatif dalam melakukan simulasi mandiri dan menyusun jalur evakuasi, tetapi masih banyak warga yang belum menunjukkan kesiapsiagaan ketika ditanya tentang langkah konkret saat bencana terjadi. Kondisi ini mencerminkan bahwa outcome program belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Dengan demikian, meskipun Program Destana telah memberikan hasil yang positif terutama dalam aspek kesadaran awal dan penyediaan struktur dasar siaga bencana, namun efektivitas dan keberlanjutan hasil tersebut masih memerlukan penguatan, baik melalui dukungan kebijakan, pelatihan lanjutan, maupun monitoring berkelanjutan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa:

1. Indikator Context: Kebutuhan terhadap program Destana sangat tinggi karena tingginya kerentanan terhadap banjir dan longsor. Namun, belum ada kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pelaksanaan Destana di tingkat kecamatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Watora & Ilham (2024) yang menunjukkan bahwa lemahnya kebijakan lokal menjadi hambatan dalam penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.
2. Indikator Input: Terdapat dukungan dari BPBD dan perangkat desa, namun masih terbatasnya dana dan sarana prasarana menjadi hambatan signifikan. Sama halnya dengan penelitian Oktari (2019) yang menyoroti kendala pendanaan sebagai faktor dominan yang menghambat efektivitas kesiapsiagaan desa. Selain itu, hasil ini memperkuat penelitian oleh Istiqowati (2018) yang menekankan bahwa keberhasilan program Destana sangat ditentukan oleh dukungan logistik dan kapasitas lokal yang memadai.
3. Indikator Process: Pelaksanaan program dimulai sejak 2022 dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan dan simulasi. Namun, lemahnya koordinasi antar BPBD, camat, dan desa menyebabkan kegiatan tidak berjalan optimal. Berbeda dengan temuan Lumempouw et al. (2021) yang menunjukkan sinergi antar aktor lokal dapat mempercepat penguatan kelembagaan desa, dalam penelitian ini koordinasi justru masih belum maksimal.
4. Indikator Product: Program baru terealisasi sekitar 70%, dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah dan belum optimalnya dampak terhadap perubahan perilaku siaga bencana. Hal ini memperkuat hasil Fitriadi et al. (2017), yang menemukan bahwa tingkat keberhasilan

program mitigasi sangat bergantung pada seberapa aktif masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi program.

Secara umum, temuan penelitian ini menguatkan studi-studi sebelumnya bahwa implementasi program berbasis masyarakat membutuhkan dukungan regulasi, pendanaan berkelanjutan, dan keterlibatan multipihak. Namun, perbedaan utama adalah bahwa penelitian ini menekankan konteks lokal dan hambatan koordinasi lintas pemerintah sebagai faktor utama belum optimalnya pelaksanaan program Destana di Kecamatan Palolo. Hal ini menjadi kontribusi ilmiah baru dalam literatur evaluasi kebijakan kebencanaan berbasis lokal.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama berdasarkan indikator evaluasi CIPP, penelitian ini juga menemukan sejumlah hal menarik yang layak untuk didiskusikan lebih lanjut. Salah satunya adalah adanya ketimpangan pelaksanaan program antara desa yang memiliki aksesibilitas tinggi dan desa yang berada di wilayah terpencil. Temuan ini mengindikasikan bahwa desa yang lebih dekat dengan pusat kecamatan atau yang memiliki infrastruktur jalan yang baik cenderung lebih aktif, mendapat pendampingan lebih rutin, serta memiliki fasilitas kesiapsiagaan yang lebih memadai. Sebaliknya, desa-desa terpencil seperti Salua dan Rejeki mengalami kesulitan mendapatkan akses terhadap pelatihan, alat siaga, serta informasi kebencanaan yang terkini.

Menariknya, meskipun terdapat keterbatasan sarana, beberapa desa menunjukkan inisiatif lokal yang kuat, seperti membentuk kelompok relawan berbasis RT atau memanfaatkan sumber daya lokal seperti balai desa untuk posko siaga. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap minimnya dukungan berkelanjutan dari pihak eksternal, dan menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih menjadi modal sosial yang potensial untuk penguatan program.

Temuan lain yang menarik adalah adanya persepsi masyarakat bahwa bencana adalah "urusan pemerintah". Hal ini ditemukan melalui observasi dan wawancara dengan warga, yang menunjukkan rendahnya rasa kepemilikan terhadap program. Program dianggap sebagai proyek musiman, bukan bagian dari rutinitas hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lumempouw et al. (2021) yang menyoroti lemahnya internalisasi nilai kesiapsiagaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi kendala tersembunyi yang membuat masyarakat enggan mengikuti kegiatan pelatihan atau simulasi, terutama pada saat musim panen atau kegiatan ladang. Ketika kegiatan program berbenturan dengan kepentingan ekonomi warga, maka keterlibatan akan sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa desain program harus lebih fleksibel dan mempertimbangkan kalender ekonomi masyarakat lokal.

Temuan-temuan ini penting untuk memperluas perspektif dalam pengelolaan program kebencanaan, bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan institusional dan anggaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya dan geografis yang melekat pada masing-masing komunitas. Maka dari itu, pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan penyesuaian konteks lokal menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan jangka panjang program Destana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kecamatan Palolo telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan

pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Namun, secara menyeluruh program ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan evaluasi menggunakan model CIPP, ditemukan bahwa masih terdapat kendala dalam hal pendanaan, koordinasi lintas sektor, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat secara merata. Oleh karena itu, program ini perlu ditingkatkan dan diperbaiki melalui penguatan kebijakan, peningkatan pelatihan, pendampingan berkelanjutan, serta pengintegrasian program ke dalam perencanaan pembangunan desa agar dapat berkelanjutan dan lebih berdampak luas.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup satu kecamatan, yaitu Kecamatan Palolo, serta terbatasnya jumlah informan yang diwawancarai, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Sigi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada evaluasi program Destana di wilayah lain dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, serta melakukan observasi langsung terhadap fasilitas dan sarana kebencanaan guna mendalami efektivitas implementasi program secara menyeluruh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sigi beserta jajaran, Camat Palolo beserta jajaran, serta Kepala Desa Ranteleda beserta Jajaran yang berkenan menerima, membantu, dan menyediakan data untuk keperluan penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Murtir Jeddawi, Mansur, & Layla Kurniawati. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 93–105. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/download/3362/1601>
- Aldunce, P., Beilin, R., Handmer, J., & Howden, M. (2016). Resilience for disaster risk management in a changing climate: Practitioners' frames and practices. *Global Environmental Change*, 44, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.03.007>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Analisis dan evaluasi hukum terkait kebencanaan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana (Studi pada Desa Loa Ipuh dan Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 46–58. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/issue/view/335>
- Fitriadi, R. W., Kumalawati, R., & Arisanty, D. (2017). *Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat*

- terhadap Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 4(1), 1–11.
- Istiqowati, C. (2018). *Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Mitigasi Bencana*. Universitas Brawijaya.
https://repository.ub.ac.id/id/eprint/162728/1/Cici_Istiqowati.pdf
- Kim, H., & Park, M. (2019). Stakeholder-inclusive evaluation in disaster risk reduction programs: A multi-level approach. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 41, 101298.
<https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101298>
- Lassa, J. A., Sagala, S., Surtiari, G. A. K., & Muslim, D. (2019). *Disaster risk governance in Indonesia and the Philippines: The case of the national disaster management agencies*. *Progress in Disaster Science*, 2, 100011.
<https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2019.100011>
- Lumempouw, S. V. M., Ruru, J. M., & Londa, Y. (2021). *Pengembangan Kapasitas Masyarakat di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(107), 73–85.
- Neef, A., Pauli, N., & Schwarz, A. M. (2018). Challenges of participatory disaster risk reduction: Evidence from the Philippines. *Environmental Hazards*, 17(3), 250–267.
<https://doi.org/10.1080/17477891.2017.1378633>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Oktari, R. S. (2019). *Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana*. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 189.
<https://doi.org/10.22146/jpkm.29960>
- Restu, P. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebencanaan Melalui Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sukaraja. *Journal of Community Development*, 5(1), 128–137.
<https://comdev.pubmedia.id/index.php/comdev/article/view/202>
- Shaw, R., Izumi, T., & Shi, P. (2020). *Perspectives of Science and Technology in Disaster Risk Reduction in Asia*. Elsevier.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Press.
- Triana, N., Saputro, E., & Rachmadi, M. (2021). Perencanaan Strategis Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa Melalui Program Destana. *Jurnal Civitas*, 18(2), 121–132.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JCI/article/view/3385>
- Wardhono, A., et al. (2023). Implementasi Penanggulangan Bencana: Studi Kasus Nagari Siaga Bencana (Nagasina) di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 5(2), 110–123.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/download/3777/1744>
- Watora, N., & Ilham, A. A. (2024). *Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Badung*. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 59–75.
- Wulandari, I., & Prasetyo, E. (2021). Evaluasi Kelembagaan Destana dalam Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana. *Jurnal Civitas*, 18(1), 64–75.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JCI/article/view/3327>

Yulianto, B., & Damayanti, N. (2022). Community-Based Disaster Risk Reduction: Lessons from the Implementation of Destana in Indonesi. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 76, 102988.

<https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102988>

Zayyinil Addina, R. (2018). Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2017–2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32297/11.%20Naskah%20Publikasi.pdf>

